

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak diterapkannya otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengelola pemerintahan secara mandiri dengan memberdayakan sumber-sumber yang dimiliki. Penggunaan sumber daya ini harus berpihak pada kepentingan masyarakat dan mampu memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Otonomi daerah memberikan harapan baru terhadap tumbuhnya kesadaran untuk membangun daerah secara lebih optimal. Otonomi daerah merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah dapat mengelola pemerintahannya sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah pusat (Fitriyanti dan Pratolo, 2009).

Otonomi daerah diberlakukan dengan diterbitkannya UU No. 22 dan 25 tahun 1999 kemudian direvisi melalui UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan semakin mandiri dalam pembiayaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah mempunyai hak dan wewenang yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. Hal ini juga menegaskan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan

alokasi sumber daya ke dalam belanja dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan, dan kemampuan daerah (Nugroho, 2010).

Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi prinsip *value for money* serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Tingkat kemampuan suatu daerah dapat diukur dengan besarnya penerimaan daerah. Pengukuran kinerja pemerintah daerah dapat dijadikan sebagai penilaian akuntabilitas dan kemampuan suatu daerah penyelenggara otonomi daerah. Dengan demikian maka suatu daerah yang kinerja keuangannya dinyatakan baik berarti daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah (Sularso dan Restianto, 2011). Pengelolaan keuangan yang harus dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah menuntut adanya kemandirian daerah dalam menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangannya. Kemandirian daerah ini dicerminkan dengan kemampuan daerah menghasilkan penerimaan pendapatan yang diperoleh daerah yang berasal dari potensi- potensi ekonomi daerah atau yang disebut juga pendapatan asli daerah (Rusydi, 2010).

Otonomi daerah yang saat ini sudah berjalan di tiap Kabupaten dan Kota D.I. Yogyakarta tetap menimbulkan persoalan baru, karena ternyata potensi fiskal pemerintah daerah yang satu dengan daerah yang lainnya masih (Ilham Tri Murdo; Junaidi Affan, 2020) beragam. Hal ini disebabkan oleh kesiapan fiskal dari masing-masing daerah

yang berbeda dalam pelaksanaan otonomi daerah. Perbedaan yang terjadi ini akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang beragam. Pemberian otonomi daerah memang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah, namun kenyataan yang terjadi dalam pemerintahan saat ini adalah dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah ternyata tidak selalu diikuti dengan peningkatan alokasi belanja modal yang dianggarkan lebih kecil dari belanja pegawai dari total anggaran belanja tiap tahunnya (Utomo, 2012). Padahal belanja modal merupakan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Adi (2007), menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang selama ini terjadi sangat ditentukan oleh faktor belanja pembangunan daerah. Pemerintah daerah harus senantiasa meningkatkan kinerja keuangannya karena berdampak pada peningkatan belanja modal, sehingga harus mendapatkan prioritas yang memadai (Sularso dan Restianto, 2011). Suwandi dan Tahar (2015), menyatakan bahwa derajat desentralisasi fiskal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal, efektivitas pendapatan asli daerah dan kemandirian keuangan berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal, serta alokasi belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Linawati dan Suhardi (2017), juga mengatakan kemandirian keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan efektivitas keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, serta alokasi belanja modal memoderasi kemandirian

dan efektivitas keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun hasil penelitian Prihastuti dkk (2015) menunjukkan kinerja keuangan daerah secara tidak langsung (melalui alokasi belanja modal) kurang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi

Berdasarkan paparan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *value for money*, derajat desentralisasi, kemandirian keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi yang dimoderasi alokasi belanja modal. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menambahkan variabel *value for money* berupa rasio ekonomis, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas. Pemerintah daerah dituntut untuk memperhatikan *value for money* dalam kinerjanya karena sektor publik sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan dan sumber kebocoran dana. Maka dengan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“Pengaruh Value for Money, Derajat Desentralisasi, Kemandirian Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Yang Dimoderasi Alokasi Belanja Modal, Studi pada Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Apakah *value for money* secara parsial berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi?

2. Apakah derajat desentralisasi secara parsial berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi?
3. Apakah kemandirian keuangan secara parsial berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi?
4. Apakah *value for money*, derajat desentralisasi, dan kemandirian keuangan secara simultan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi?
5. Apakah alokasi belanja modal berpengaruh memoderasi *value for money*, derajat desentralisasi, dan kemandirian keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi?

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membuat batasan masalah guna mempersempit penelitian supaya lebih terfokus pada masalah yang akan diteliti. Penulis dalam menguji hipotesis menggunakan analisis regresi berganda dengan variabel moderasi, atau uji Moderated Regression Analysis (MRA), dengan model uji interaksi. Variabel dalam penelitian ini terdapat tujuh variabel. Variabel bebasnya adalah *value for money* berupa rasio ekonomis (X1), rasio efisiensi (X2), dan rasio efektivitas (X3), serta derajat desentralisasi fiskal (X4) dan kemandirian keuangan daerah (X5), sedangkan variabel terikatnya adalah pertumbuhan ekonomi (Y). Variabel moderasinya adalah alokasi belanja modal (X6). Sampel dari penelitian ini seluruh Kabupaten dan Kota yang ada di D.I. Yogyakarta, yang berjumlah 4 Kabupaten dan 1 Kota, yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten

Sleman, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Kulon Progo yang mempublikasikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) secara berturut-turut dari tahun 2014 sampai 2018.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji secara parsial terkait pengaruh positif *value for money* terhadap pertumbuhan ekonomi
2. Untuk menguji secara parsial terkait pengaruh positif derajat desentralisasi terhadap pertumbuhan ekonomi
3. Untuk menguji secara parsial terkait pengaruh positif kemandirian keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi
4. Untuk menguji secara simultan terkait pengaruh positif *value for money*, derajat desentralisasi, dan kemandirian keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi
5. Untuk menguji secara empiris terkait alokasi belanja modal berpengaruh memoderasi *value for money*, derajat desentralisasi, dan kemandirian keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi

1.5 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti secara parsial pengaruh *value for money* terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti secara parsial pengaruh derajat desentralisasi terhadap pertumbuhan ekonomi.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti secara parsial pengaruh kemandirian keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi.

4. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti secara simultan pengaruh *value for money*, derajat desentralisasi, kemandirian keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi.
5. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti secara empiris pengaruh alokasi belanja modal memoderasi *value for money*, derajat desentralisasi, dan kemandirian keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memahami lebih jelas laporan ini, maka materi-materi yang tertera pada Laporan Skripsi ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, Batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI & PERUMUSAN HIPOTESIS

Bab ini berisikan teori yang berupa pengertian dan definisi yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan laporan skripsi dan beberapa literature review yang berhubungan dengan penelitian. Selain itu juga berisikan perumusan hipotesis dan model penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengambilan dan pengolahan data, alat analisis, dan definisi operasional.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan karakteristik objek penelitian, deskripsi data, analisis data, dan pembahasan.

BAB V SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Bab ini berisikan simpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran yang bermanfaat bagi peneliti berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2007. Akuntansi Sektor Publik. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat
- Abdul Halim & Syam Kusufi. 2012. Akuntansi Sektor Publik: teori, konsep dan aplikasi. Salemba Empat : Jakarta
- Adi, P. H. 2007. "Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kotase JawaBali)". Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik, Vol 08, No.1.
- Ani, N. L. N. P dan A.A.N.B Dwirandra. 2014. Pengaruh kinerja keuangan daerah pada pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan Kabupaten dan Kota. E-Jurnal akuntansi Universitas Udayana 6 (3): 481-497
- Annisa, G.R. 2011. Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia, pengangguran dan kemiskinan dengan kinerja keuangan sebagai variabel antededen (studi kasus pada pemerintah daerah di Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Timur). Skripsi tidak dipublikasikan Fakultas Ekonomi Akuntansi UII Yogyakarta.
- Arikunto S. 1998. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Cetakan ke-11. Jakarta: PT Rineka Cipta. Hlm: 99
- Aulia, Nely. 2014. Hubungan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, dan Kesenjangan Pendapatan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012. Economics Development Analysis Journal 3 (2).
- Astuti, Y. T., & Binawati, E. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Komisaris Independen, Umur Perusahaan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Islamic Social Reporting Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Indeks (JII) Periode Tahun 2013-2017. *Jurnal Optimal*, 17(1), 149-157.
- Binawati, E. (2015). Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dan Akuntabilitas Sektor Publik Studi pada Pemerintah DIY. *Wahana*, 18(1), 1-19.
- Binawati, E., & Badriyah, N. (2022). Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Magelang. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 2(1), 32-49.
- Binawati, E., & Susliyanti, E. D. (2020). Pengaruh Kualitas Teknologi Informasi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Yang Dimoderasi Dengan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (Sap) Berbasis AkruaL Dan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah. *Jurnal Optimal*, 17(2), 20-37.

- Binawati, E., & Nindyaningsih, C. T. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Optimal*, 19(1), 19-39.
- Fitriyanti & Pratolo. (2008). "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan BelanjaPembangunan Terhadap Rasio Kemandirian dan Pertumbuhan Ekonomi." Proceeding Konferensi Penelitian Keuangan Sektor Publik, Jakarta.
- Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariant dengan Program IBM SPSS.Edisi 7. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.
- Khusaini, Mohammad. 2006. Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah. Malang: BPFE Unibraw.
- Linawati dan Suhardi.2017.Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Moderasi Alokasi Belanja Modal.From:<http://www.ejournal.kahuripan.ac.id/index.php/Ekuivalensi/article/view/54>.Diakses pada 01 April 2020.
- Linawati, dkk. 2018. Alokasi Belanja Modal Sebagai Pemoderasi Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Karesidenan Kediri. *Majalah Ekonomi _ ISSN No. 1411-9501 _ Vol. XXIII No. 1*
- Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah.Penerbit Andi Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik.Yogyakarta:Andi
- Murdo, I. T., & Affan, J. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia Dari Sisi Pendapatan Nasional Pendekatan Pengeluaran. *Kajian Ekonomi dan Bisnis*, 15(2).
- Nugroho, Fajar dan Rohman, Abdul. (2012). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Di Provinsi Jawa Tengah). Universitas Dipenogoro, Semarang.
- Nurhemi dan Suryani. 2015. Dampak Otonomi Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Volume 18 Nomor 2.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pratiwi Nuurannisa. 2018. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi daerah.
- Prihastuti, dkk. 2015. Pengaruh kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/ Kota Riau. *Jurnal Sorot*, 10(2): 143154.
- Rahayu, S. B., Widodo, S., & Binawati, E. (2019). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi lembaga zakat terhadap tingkat kepercayaan muzakki (Studi Kasus pada Lembaga Amil

- Zakat Masjid Jogokariyan Yogyakarta). *Journal of Business and Information System (e-ISSN: 2685-2543)*, 1(2), 103-114.
- Ramadhan, R., & Binawati, E. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Menggunakan Metode Mix Method (Pada Kantor Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Kota Yogyakarta). *Kajian Ekonomi Dan Bisnis*, 15(1).
- Rusydi, Bahrul Ulum. 2010. Analisis Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dan Deteksi Ilusi Fiskal. Universitas Dipenogoro, Semarang.
- Santoso, Singgih. 2012. Panduan Lengkap SPSS Versi 20. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sartono, Ali. 2018. Analisa Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang tahun 2012-2016 Berdasarkan Konsep Value for Money.
- Siregar, Helly Aroza. 2016. Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Pemoderasi. KURS Vol. 1 No. 1.
- Setyawati, H., & Fitriastuti, L. I. (2023). PENGARUH RASIO KEUANGAN, ECONOMIC VALUE ADDED (EVA), MARKET VALUE ADDED (MVA) TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN PERKEBUNAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2015-2020. *Kajian Ekonomi dan Bisnis*, 18(1).
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sukarmi, N.W., dan Iga, N.B. 2016. Alokasi belanja modal sebagai pemoderasi pengaruh kinerja keuangan pada pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan bisnis Universitas Udayana*. 5 (3): 545-572
- Sularso dan Restianto. 2011. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah. Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto. *Media Riset Akuntansi*, Vol.1 No.2
- Sularso, Sri. 2003. Metode Penelitian Akuntansi Sebuah Pendekatan Replikasi. Yogyakarta. BPFE
- Susliyanti, E. D., & Binawati, E. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Dan Akuntabilitas Kinerja Terhadap Kepercayaan Dan Kepuasan Masyarakat Atas Penggunaan Dana Desa. *Efektif Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 1.
- Suwandi, Kurni Adi dan Tahar, Afrizal. 2015. "Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening". Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
From: <https://journal.trunojoyo.ac.id/infestasi/article/viewFile/1127/957>. Diakses pada tanggal 20 Maret 2020.

Utomo, Susilo Prasetyo. 2012. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Pemediasi. Universitas Sebelah Maret, Surakarta.

Vemberi, Y., Fitriastuti, L. I., Affan, J., & Herawan, T. (2022). Covid-19 Impact on Tourism and Hospitality: A Review of the Evidences. *Quality-Access to Success*, 23(190).

Widarjono, Agus. 2015. *Analisis Multivariat Terapan Dengan Program SPSSAMOS dan SMARTPLS. Edisi Kedua. UPP STIM YKPN*

Yustikasari dan Darwanto (2007). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.

www.bps.go.id.

www.djpk.depkeu.go.id.